

EFEKTIVITAS WEBSITE DALAM PELAYANAN ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA DEPOK

Nida Handayani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ
nidakrw@gmail.com

ABSTRAK

This study uses qualitative descriptive study which will explain and describe the conditions of management of the website by looking at the initial appearance of the website, website development, government interaction with the public on the website, transactions or services carried out by the government to the public, and the connection or integration between the City of Depok work unit below it such as the Department, Agency, and others. The results of the study explained that, early occurrence of Depok City Government website is quite good by displaying various kinds of actual information related to the mission, vision, and duties and functions of Depok City Government. The development in Depok City Government website managed by the Office of Communications and Information is quite significant by adding several features that can help the public service. On the interaction media provided in Depok City Government portal are quite considerable; eg via email, website, facebook, twitter, rss, Sp @ce, and others that are quite interactive. Furthermore, the transaction or service with the local administration is substansial such as online permit service, online tax payment, and checking the status of eKTP. Lastly, connection or integration between Depok City Government website with the unit below it is sufficient although there are some that can not be accessed.

Supporting factors are the manager of the Depok City Government website namely Documentation and Information Management Officer (PPID) is quite interactive and always update data and in-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e Government melalui website Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, awal kemunculan website Pemkot Depok menampilkan berbagai macam informasi yang aktual terkait misi, visi, dan tupoksi Pemerintah Kota Depok. Peningkatan website Pemkot Depok yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi menambah beberapa fitur yang dapat membantu pelayanan kepada masyarakat. Pada media interaksi yang disediakan dalam portal Pemkot Depok seperti email, website, facebook, twitter, rss, Sp@ce, dan lainnya. Selanjutnya transaksi atau pelayanan yang dilakukan pemkot Depok antara lain; pelayanan perizinal online, pembayaran pajak online, dan pengecekan status eKTP. Terakhir koneksi atau integrasi antara website Pemkot Depok dengan unit kerja dibawahnya sebagian dapat terealisasi, namun beberapa yang lainnya belum.

Faktor pendukung dimana pengelola website Pemkot Depok yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) cukup interaktif dan selalu meng up date data dan informasi yang ada. Faktor penghambat adalah belum semua masyarakat Depok dapat mengakses website Pemkot Depok karena terkait kemampuan secara pendidikan, serta kurangnya sosialisasi terkait beberapa pelayanan yang dapat dilakukan pada website Pemkot Depok.

Kata Kunci: website, pelayanan elektronik

formation. Inhibiting factors are not all people can access the Depok City Government website due education-related abilities, as well as the lack of socialization related to some services that can be accessed through the Depok City Government website.

Keyword: website, e-Government

LATAR MASALAH

Otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aturan Perundang-undangan. Melalui konsep otonomi daerah ini, setiap daerah dapat melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Perkembangan teknologi Informasi menuntut Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, dimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting saat ini, dimana akses internet yang sangat luas dalam berbagai bidang seperti penjualan (e-business atau e-commerce), pendidikan (e-learning), perbankan (e-banking), dan social networking. Berbagai keuntungan diberikan teknologi informasi khususnya internet, yaitu membuat proses penyebaran informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah serta tanpa batasan jarak dan waktu. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan teknologi ini membuat teknologi informasi khususnya internet banyak diterap-

kan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan.

Strategi pengintegrasian teknologi informasi khususnya internet kedalam berbagai macam aspek kegiatan pemerintah telah lama dilakukan oleh Negara-negara maju, hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan optimal. Salah satu upaya penerapan teknologi informasi kedalam aspek pemerintahan adalah dengan hadirnya suatu alat yang diberi nama electronic government atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-government, dan salah satu wujud nyata dari pengaplikasian e-government adalah dengan adanya pembuatan situs resmi atau website bagi setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Penggunaan internet dapat diaplikasikan kedalam pelayanan pemerintah yang berbasis teknologi informasi melalui media e-government dengan penerapan web Pemerintah Daerah. Website adalah salah satu media e-government yang bertujuan meningkatkan pelayanan elektronik yang akan memudahkan masyarakat mengakses informasi, layanan, dan lain-lain.

Pembangunan e-government kini terus berkembang, sejalan dengan kemajuan

tehnologi informasi, saat ini inisiatif pembangunan e-government juga dilakukan oleh Negara-negara sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pembangunan situs web bagi Pemerintah Indonesia merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangann e-Government yang isinya menyerukan pemanfaatan tehnologi informasi (internet) dalam menunjang aktivitas pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menuju terwujudnya e-government di Indonesia.

Dalam Inpres No 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa arah pengembangan e-government ditujukan untuk: a) pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik (website presence), b) pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha (interaction), c) pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga Negara (transaction), d) pembentukan system manajemen dan proses kerja (transformation).

Bukan tanpa alasan mengapa e-government harus diterapkan oleh pemerintah suatu Negara. Penerapan e-government bagi suatu Negara memiliki banyak dampak positif atau manfaat., antara lain:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya
2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam penerapan konsep Good Cooperation Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di-

keluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui berbagai interaksi dengan pihak-pihak yang berkepentingan
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lainnya sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara merata dan demokratis, dan
7. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dengan menciptakan pelayanan berbasis informasi tehnologi Kota Depok sebagai salah satu Pemerintahan Daerah yang ada di Indonesia yang juga ikut ambil bagian dalam rangka menunaikan kewajiban untuk mengimplementasikan Inpres No 3 Tahun 2003, yaitu melalui website Kota Depok: www.depok.go.id memberikan akses informasi, pelayanan, dan lain-lain.

Keberadaan website Kota Depok diharapkan dapat membantu masyarakat dalam hal pemberian pelayanan, dimana pelayanan akan lebih mudah, cepat, dan transparan. Selain itu diharapkan masyarakat juga dapat memberikan sumbangan saran, ide, atau ga-

gasan demi kemajuan Kota Depok. Melalui website tersebutlah harapan-harapan tadi ingin diwujudkan. Dengan demikian keberadaan website Kota Depok perlu dianalisis efektifitasnya, apakah sudah cukup memenuhi harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari keberadaan website tersebut atautkah belum efektif dalam implementasinya.

Menjawab pertanyaan tadi, maka perlu diteliti mengenai efektifitas website Pemerintah Kota Depok, sehingga dapat kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari website tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini informan diarahkan untuk dapat menggambarkan/menceritakan secara detail efektifitas website Pemerintah Kota Depok melalui portal www.depok.go.id, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan elektronik yang dilakukan melalui portal Pemerintahan Kota Depok tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan peran subyektif dari setiap informan dalam memperoleh informasi. Dengan kata lain sisi "emic" lebih ditonjolkan dengan mendiskripsikan informasi yang diperoleh berdasarkan pada pernyataan, pola pikir dan interpretasi informan sehingga akan dapat diperoleh data tersembunyi.

PEMBAHASAN

Efektivitas Website Pemerintah Kota Depok Sebagai Media e-Government

E-government adalah sebuah bentuk pelayanan elektronik yang dilakukan pemerintah kepada citizen atau masyarakat, pemerintah kepada sektor privat (bisnis), dan pemerintah dengan pemerintah. Pelaksanaan e-government ini disosialisasikan oleh pemerintah melalui Inpres no 3 tahun 2003, dimana pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi. Dalam perkembangannya pemerintah daerah mengembangkan berbagai macam bentuk pelayanan berbasis IT dengan tujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi pelayanan yang selama ini dilakukan.

Berdasarkan literatur administrasi ataupun manajemen, kata efektifitas diartikan sebagai suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya adalah efektif, sebaliknya bila tujuan atau sasaran tidak selesai sesuai waktu yang ditentukan, pekerjaan itu dikatakan tidak efektif.

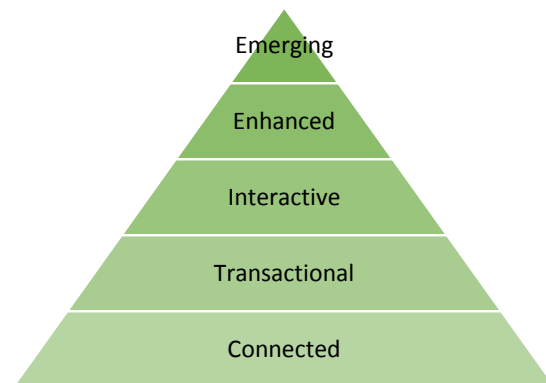
Salah satu bentuk pelayanan elektronik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyediakan portal atau alamat website pemerintah daerah yang berisi berbagai macam konten sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sasaran dan tujuan yang

ingin disampaikan oleh pemerintah adalah isi informasi yang terdapat dalam website itu sendiri, sehingga dapat dijadikan tolak ukur oleh masyarakat, jadi bisa dikatakan apabila website tersebut banyak yang mengakses dengan isi atau informasi yang up to date.

Pemerintah daerah Kota Depok dalam rangka pelaksanaan e-government membuat sebuah portal atau website yang dapat diakses masyarakat Kota Depok dengan alamat www.depok.go.id dengan berbagai fitur sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat Depok.

Dalam menilai efektivitas website pemerintah daerah Kota Depok, dapat dilihat melalui fase perkembangan website sebagai media e-government, antara lain: pertama, emerging (kemunculan) website Kota Depok apakah konten atau fitur yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat, serta tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Kedua, enhanced (peningkatan) website pemerintah Kota Depok apakah terus melakukan up date data atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat aktual. Ketiga interactive (interaksi), apakah website pemerintah daerah Kota Depok menyediakan fitur komunikasi dua arah yang dapat menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Keempat transactional (transaksi), adakah pelayanan yang bersifat transaksi, dimana masyarakat dapat memproses sebuah pelayanan melalui website pemerintah Kota Depok. Dan tahapan connected (koneksi), dimana pemerintah daerah Kota Depok dapat terhubung dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lainnya, sehingga website Pe-

merintah Kota Depok dapat melakukan pelayanan terpadu. Indikator tersebut dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar: Tahapan Perkembangan Website sebagai Media e-Government

Tahap I - Emerging (Kemunculan)

Pada tahap ini website pemerintahan daerah dapat menampilkan informasi-informasi mengenai pemerintah daerah, terutama pada tahap kemunculan dengan memperkenalkan berbagai informasi terkait pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, website/portal resmi Kota Depok melalui www.depok.go.id pada tahap kemunculannya menampilkan informasi antara lain:

➤ **Profil Kota Depok.**

Pada kolom ini menjelaskan mengenai visi misi Kota Depok, struktur organisasi perangkat daerah, lambang dan identitas, sejarah, ikon Kota Depok, seni dan budaya, sosial ekonomi, penghargaan yang pernah diraih, demografi dan biografi.

➤ **Berita**

Kolom ini menginformasikan berbagai berita terkait pemerintah Kota Depok atau

berbagai kegiatan yang dilakukan, berita Organisasi Perangkat Daerah (OPD), press release, dan warta Depok.

➤ ***Instansi***

Kolom ini menjelaskan tentang satuan kerja di bawah pemerintahan Kota Depok, seperti Dinas, kantor, badan, setwan, OPD, sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan

➤ ***Direktori kota***

Kolom ini menjelaskan tentang sarana prasarana yang ada dan dimiliki oleh pemerintah Kota Depok seperti pendidikan, sarana kesehatan, lokasi Bank, hiburan, perbelanjaan, penginapan dan gedung, lokasi SPBU, UMKM dan khas Depok

➤ ***Layanan***

Pada kolom ini memberikan berbagai informasi terkait pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Depok seperti layanan kependudukan, layanan perizinan, pajak, pengadaan, dan info publik.

➤ ***Agenda***

Kolom ini memberikan informasi tentang agenda walikota, jadwal perpustakaan keliling, dan jadwal M-CAP dimana masyarakat dapat mengetahui berbagai kegiatan yang diadakan pemerintah Kota Depok dengan jadwal kegiatan dengan transparansi.

Website Kota Depok pada awal kemunculan telah menampilkan berbagai informasi yang bisa di sampaikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang dibutuhkan untuk masyarakat dapat mengenal pemerintahannya, karena tujuan dari adanya website pemerintahan daerah adalah sebagai sumber informasi yang paling cepat diperoleh masyarakat.

Tahap II – Enhance (Peningkatan)

Pada tahapan peningkatan, website pemerintah daerah hendaknya memberikan tambahan-tambahan fitur atau informasi lebih lanjut yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada website pemerintah Kota Depok menambahkan beberapa fitur yang dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat antara lain:

➤ ***Pelayanan Perizinan***

Fitur ini ditambahkan sebagai pembaharuan informasi mengenai pelayanan tentang perizinan yang lebih detail dengan memberikan berbagai informasi pelayanan perizinan terintegrasi antara portal www.depok.go.id dengan <http://bpmp2t.depok.go.id>, dimana informasi yang dapat diperoleh antara lain mengenai izin pemanfaatan ruang, pengesahan site plan, izin mendirikan bangunan (IMB), izin industri, izin pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan, izin lokasi, izin gangguan, izin usaha pariwisata, izin pemasangan rekla-

me, izin prinsip, izin pengelolaan air bawah tanah, dan izin usaha jasa konstruksi

➤ **Transparansi Anggaran**

Fitur ini adalah integrasi antara portal www.depok.go.id dengan <http://sitra.depok.go.id>. Sitra adalah sistem informasi dan transparansi anggaran Kota Depok yang merupakan sistem yang dibuat untuk menginformasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran pemerintahan Kota Depok pertahun. Pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilaporkan dengan tujuan masyarakat bisa mengawasi secara langsung penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Tidak hanya terintegrasi dengan Sitra, pada fitur ini juga terintegrasi dengan portal <http://sirup.lkpp.go.id>. Sirup adalah sistem informasi rencana umum pengadaan dibawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP juga memiliki portal lain yaitu www.monev.lkpp.go.id. yang terintegrasi dengan portal www.depok.go.id melalui program tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA). Selain Sitra dan Sirup, LKPP juga melalui portal <https://lpse.depok.go.id> menyediakan informasi secara elektronik melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

➤ **Info Kependudukan**

Pada fitur ini website pemerintah kota Depok terintegrasi dengan portal <http://disdukcapil.depok.go.id>. Serta memberikan

berbagai informasi diantaranya: informasi tentang persyaratan pembuatan KTP, KK, AKTA dan LAPID, informasi tentang SOP pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta info grafis kependudukan dalam angka. Disdukcapil melalui integrasinya dengan website Kota Depok juga menyediakan sarana interaksi dengan masyarakat melalui sms gateway untuk mengetahui status e-KTP.

➤ **Informasi publik**

Kolom ini berfungsi memberikan berbagai informasi kepada masyarakat terkait berbagai agenda kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Depok dengan mengklasifikasikan jenis dan bentuk berita, diantaranya:

- a. Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala, (dirilis 12 Maret 2013)
- b. Informasi yang diumumkan serta merta, (dirilis tanggal 10 Desember 2013: 18.15)
- c. Informasi wajib tersedia setiap saat, (dirilis 12 Maret 2013: 9.59)
- d. Tentang informasi publik, pada kolom ini menjelaskan tentang informasi publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- e. PPID Kota Depok, pada kolom ini langsung terintegrasi dengan PPID Kota Depok.

➤ **Sistem Informasi**

Pada kolom ini membenrikan berbagai informasi dan adanya integrasi dengan Dinas atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan melauai sistem atau hanya sekedar memberikan sebuah informasi kepada masyarakat, dalam kolom ini terdiri dari

- 1) Direktori perusahaan, menyediakan data perusahaan yang ada di wilayah Pemkot Depok
- 2) PBB dan BPHTB
- 3) eSPTPD
- 4) eSPPT PBB
- 5) Perizinan online
- 6) Sistem perkantoran maya, SIMAYA adalah e-office portal dimana pekerjaan yang dilakukan secara online baik oleh pihak pimpinan maupun pegawai lainnya dengan mengakses www.simaya.go.id
- 7) SIM satu data perencanaan pembangunan
- 8) Lokal helpdesk
- 9) Sistem informasi posyandu
- 10) Jamkesda
- 11) IDSD
- 12) Sitra
- 13) Simpad
- 14) Integrasi data
- 15) Sp@ce
- 16) Online public access catalog perpustakaan umum Depok
- 17) SI pelaporan dan keamanan pangan Dinkes
- 18) Sistem informasi kebugaran (sibugar)
- 19) Jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- 20) Bursa kerja online
- 21) Sistem informasi puskesmas
- 22) SI pendataan dan perkembangan UMKM
- 23) Data pokok pendidikan (dapodik)
- 24) RKPD Online
- 25) SI Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
- 26) Sistem Informasi Koperasi

Kolom sistem informasi ini terintegrasi dengan berbagai Dinas atau Badan sesuai dengan unit kerjanya sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan pelayanan berbasis informasi teknologi (IT) dengan satu portal www.depok.go.id dan terhubung dengan satuan kerja dibawahnya.

Tahap III – Interactive (Interaktif)

Efektivitas website pemerintah daerah yang baik adalah dimana pada portal resmi pemerintahannya telah menyediakan sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Pada website pemerintah Kota Depok dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi Kota Depok dengan alamat email: portal@depok.go.id

Interaksi antara pemerintah Kota Depok dengan masyarakat disediakan dengan berbagai macam media diantaranya:

- a. Call center Pemkot Depok di no (021) 1500664, layanan dilakukan dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 s/d 16.00
 - b. Facebook, dengan nama Kota Depok dan sudah dikunjungi oleh 28.765 orang. Memiliki selogan "dari warga Depok oleh warga Depok untuk warga Depok"
 - c. Rss dengan alamat Feeds.feedburner.go.id
 - d. Twitter dengan nama Pemkot Depok (@pemkotdepok) dan memiliki 28 ribu pengikut
 - e. Youtube dengan nama Pemkot Depok, bergabung pada 22 September 2011, memiliki 67 pelanggan dan sudah dilakukan 25.274 kali penayangan sampai dengan tanggal 21 November 2016
 - f. Email dengan alamat portal@depok.go.id
 - g. Sp@ce, dengan alamat space.depok.go.id
- Pada tahapan ini pemerintah Kota Depok cukup aktif menyediakan ruang interaktif bagi masyarakatnya, dan dalam menanggapi masyarakat cukup responsif.
- Tahap IV - Transactional (Transaksi)**
- Pada tahapan ini masyarakat dapat melakukan transaksi artinya masyarakat akan mendapatkan pelayanan berbasis online. Pada Pemkot Depok ada beberapa pelayanan yang dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan website Pemkot Depok, diantaranya:
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan pelayanan sms gateway bagi masyarakat yang ingin mengetahui status e-KTP nya dengan cara: ketik NIK#No NIK dan dikirim ke no 0821-1101-4433
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Ase Kota Depok melalui portal pbb-bphtb.depok.go.id yang terintegrasi dengan portal Pemkot Depok memberikan pelayanan online diantaranya:
 - Simulasi menghitung besaran BPHTB di Kota Depok
 - Melakukan pengecekan PBB Kota Depok secara online
 - c. Geoportal BAPPEDA Kota Depok, aplikasi ini merupakan pintu masuk kedalam aplikasi GIS. Sebagai portal, aplikasi ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi penting dan aktual terkait data di Kota Depok selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai web administrator yang berfungsi untuk *Content Management System (CMS)*, yang menyediakan fitur untuk pengaturan pengguna dan hak aksesnya. Pelayanan yang diterima oleh masyarakat dari aplikasi ini adalah segala macam informasi yang terkait Kota Depok.
 - d. OPAC (Online Public Access Catalog), masyarakat dapat mengakses buku-buku yang tersedia secara online di perpustakaan digital milik Perpustakaan umum Kota Depok melalui portal opac.depok.go.id.

- e. Bursa Kerja Online yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui portal bkol.depok.go.id
- f. Pendaftaran UMKM di wilayah Pemkot Depok
- g. Perizinan online

Tahap V – Connected (Koneksi)

Pada tahap ini website Pemkot Depok melalui portal www.depok.go.id sudah terintegrasi dengan berbagai satuan instansi dibawahnya, diantaranya:

- a. <http://bpmp2t.depok.go.id>
- b. [Lkpp.depok.go.id](http://lkpp.depok.go.id)
- c. [Disdukcapil.depok.go.id](http://disdukcapil.depok.go.id)
- d. [Disnakersos.depo.go.id](http://disnakersos.depo.go.id)
- e. [Pbb-bphtb.depok.go.id](http://pbb-bphtb.depok.go.id)
- f. [Bappeda.depok.go.id](http://bappeda.depok.go.id)
- g. Perpustakaan umum Kota Depok
- h. Posyandu Kota Depok
- i. [Jamkesda.depok.go.id](http://jamkesda.depok.go.id)
- j. [Dinkes.depok.go.id](http://dinkes.depok.go.id)
- k. Puskesmas Kota Depok

Berdasarkan 5 fase perkembangan website Pemkot Depok dapat dinyatakan bahwa secara umum kemunculannya cukup memberikan informasi yang faktual dan aktual terlihat dari beberapa fitur yang dapat menginformasikan secara jelas tentang Pemkot Depok. Kemudian pada fase peningkatan menampilkan banyak fitur baru dengan berbagai fungsi dan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya fase interaksi, porta Pemkot Depok menyediakan banyak ruang komunikasi bagi masyarakat untuk bisa lebih dekat dengan pemerintah Kotanya. Selanjutnya fase transaksi juga sudah cukup banyak pelayanan yang dilakukan secara online kepada masyarakat, langkah ini ada bentuk efektivitas pelayanan dengan menggunakan suatu sistem berbasis IT. Terakhir adalah fase koneksi pada portal Pemkot Depok sangat baik, karena setiap unit kerja dibawah Pemkot Depok dapat diakses melalui portal Depok.go.id artinya sudah dilakukannya integrasi antar dinas, badan atau satuan kerja dilinhkungan Pemkot Depok.

Secara keseluruhan website Pemerintah Kota Depok cukup efektif untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik sebagai penyedia informasi maupun pelayanan online. Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan yang baik oleh Pemkot Depok melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) yang cukup aktif dalam melakukan pembaharuan data dan inovasi sitem.

Faktor Pendukung Website Sebagai Media E-government

Faktor pendukung Website Pemerintah Kota Depok sebagai media E-Government dalam memberikan pelayanan elektronik diantaranya:

1. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai macam bentuk informasi dengan cepat, sehingga masyarakat Kota Depok akan mudah menerima in-

formasi yang disampaikan oleh pemerintah, baik terkait sosialisasi kebijakan atau kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, masyarakat dapat berinteraksi melalui media website yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok secara aktif, sehingga hubungan atau komunikasi dua arah lebih efektif dan efisien
3. Adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok mengenai informasi maupun tampilan sehingga adanya perubahan dan perbaikan penampilan website secara berkala.
4. Terjadinya peningkatan website Kota Depok juga terlihat dari adanya integrasi sistem yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok dengan Unit Satuan Kerja dibawahnya seperti Dinas, Badan, BUMD, dan lainnya.
5. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), website Pemkot Depok dapat berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga terjalinnya kerjasama saling mengontrol dan transparansi publik.

Faktor Penghambat Website Sebagai Media E-government

Faktor penghambat Website Pemerintah Kota Depok sebagai media E-Government dalam memberikan pelayanan elektronik diantaranya:

1. Walaupun tingkat pendidikan cukup baik, namun tidak semua masyarakat

Kota Depok melek teknologi, artinya masih ada masyarakat yang merasa kesulitan dengan informasi dan pelayanan berbasis sistem ini

2. Perkembangan sistem informasi dan pelayanan Pemkot Depok belum dapat tersosialisasikan dengan baik, hal tersebut menyebabkan masyarakat yang bingung dan tidak tahu sistem baru yang telah ada.

Penutup

Website Pemerintah Kota Depok secara umum sudah sangat efektif dengan informasi yang up to date dan pelayanan yang dilakukan secara online memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan kebutuhannya sebagai warga Depok. Pelayanan online juga dianggap lebih efisien karena transaksi hanya dilakukan lewat media online tanpa masyarakat perlu datang pada instansi yang dituju. Hal seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah, sehingga pelayanan lebih bersifat mudah dan murah.

Portal Pemkot Depok juga dikembangkan dengan cukup baik, dimana beberapa portal daerah lainya masih susah diakses, pada Portal Pemkot Depok sudah bisa mengakses unit kerja dibawah Pemkot Depok melalui Portal yang sama yaitu www.depok.go.id.

Sangat efektif bukan berarti tidak adanya kekurangan pada website yang dikelola oleh PPID Pemkot Depok, karena integrasi dengan beberapa unit kerja dibawahnya juga belum berhasil seutuhnya, karena ada beberapa unit kerja yang lemah akses nya atau informasi

yang belum terkoneksi. Pada portal Pemkot Depok hanya tersedia medianya saja, namun belum dapat diakses.

Ada beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Depok khususnya Dinas Teknologi informasi dalam pelayanan berbasis IT kepada masyarakat, diantaranya:

1. Bagi warga yang mengalami hambatan dengan adanya sistem berbasis IT ini, atau dengan kata lain tidak melek sistem IT, maka perlunya dilakukan pelatihan terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi lebih jauh mengenai perubahan paradigma pelayanan berbasis IT.
2. Lakukan sosialisai dengan baik pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama menyangkut perubahan sistem berbasis IT ini
3. Terus lakukan perkembangan pada website yang sudah dimiliki dengan langkah awal unit kerja dibawah Pemkot Depok yang sudah tercantum ada portal Pemkot Depok tapi belum dapat diakses dapat segera di up date, sehingga tidak ada lagi fitur yang hanya sebagai pajangan atau hiasan pelengkap dalam website yang dianggap cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2007. Sistem informasi Akuntansi. T Lingga Jaya. Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mark Forman,. *E-Government: Using IT to Transform the Effectiveness and Efficiency of Government.*,2005
- Sedarmayanti. 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV Mandar maju. Bandung.
- Supriyono. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2000. Peranan Ilmu Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik. PPs UGM, Yogyakarta
- W. Bennis. and M.Mische,. *The 21 Century Organization.* Pfeiffer&Company.NewYork, 1995
- Yamit. 2003. Manajemen Produksi dan Operasi. Edisi 2. Ekonisia. Yogyakarta.